

## POTENSI KEKUATAN MARITIM SEBAGAI PENGGERAK PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Hanum Rezky Melinda, Eliyanti Agus Mokodompit  
Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Email penulis: [hanum.rezky07@gmail.com](mailto:hanum.rezky07@gmail.com), [eliyantiagusmokodompit@uho.ac.id](mailto:eliyantiagusmokodompit@uho.ac.id)

**Abstract:** This research aims to analyze the potential of maritime power in Southeast Sulawesi Province as a driver of sustainable economic development through a multidimensional approach. The research method uses a qualitative approach with library research strategy and documentary analysis techniques on relevant secondary literature. Data analysis was conducted using thematic analysis with an interpretive framework. The results show that Southeast Sulawesi has a strategic geographical position as part of ALKI III with diverse maritime potential that has not been optimally utilized. The blue economy development model through adaptive government-community collaboration with human resource capacity strengthening is key to transforming potential into real economic power. Implementation of quota-based Measured Fishing can maintain resource sustainability while improving fishermen's welfare. Challenges include regulatory complexity, infrastructure limitations, low human resource quality, and environmental degradation. Strategic solutions include policy synergy, business diversification based on local potential, and application of modern maritime technology to support SDGs achievement and realize Indonesia as the world's maritime axis.

**Keywords:** Maritime Power, Sustainable Economy, Blue Economy, Southeast Sulawesi, Sustainable Development

**Abstrak:** Penelitian bertujuan menganalisis potensi kekuatan maritim Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pendekatan multidimensional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi library research dan teknik documentary analysis terhadap literatur sekunder yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan thematic analysis dengan kerangka interpretive framework. Hasil penelitian menunjukkan Sulawesi Tenggara memiliki posisi geografis strategis sebagai bagian ALKI III dengan potensi maritim beragam yang belum optimal dimanfaatkan. Model pengembangan blue economy melalui kolaborasi adaptif pemerintah-masyarakat dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci transformasi potensi menjadi kekuatan ekonomi riil. Implementasi Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota dapat menjaga kelestarian sumber daya sambil meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tantangan meliputi kompleksitas regulasi, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas SDM, dan degradasi lingkungan. Solusi strategis mencakup sinergi kebijakan, diversifikasi usaha berbasis potensi lokal, dan penerapan teknologi maritim modern untuk mendukung pencapaian SDGs dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

**Kata Kunci:** Kekuatan Maritim, Ekonomi Berkelanjutan, Blue Economy, Sulawesi Tenggara, Pembangunan Berkelanjutan

### Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 675

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi kekuatan maritim yang sangat strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam mengembangkan *maritime economy* yang berkelanjutan (Pascasarjana UMSU, 2023). Potensi ekonomi maritim Indonesia diperkirakan mencapai nilai ekonomi minimal 8,22 triliun dolar Amerika per tahun, yang mencakup sektor perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, energi lepas pantai, sumber daya mineral, industri kelautan, bangunan kelautan, dan jasa kelautan (Rhodora V. Azanza et al., 2022). Realitas ini menempatkan Indonesia dalam posisi strategis untuk menjadi poros maritim dunia, sebagaimana dicita-citakan dalam visi pembangunan nasional jangka panjang.

Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan posisi geografisnya yang strategis di kawasan timur Indonesia, memiliki karakteristik unik sebagai wilayah kepulauan dengan potensi kekuatan maritim yang belum optimal dimanfaatkan. Sebagai bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III, Sulawesi Tenggara memiliki keunggulan lokasi dalam konteks jalur maritim *One Belt One Road* (OBOR), yang membuka peluang besar untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan memperkuat konektivitas maritim serta kerjasama regional (PPID Utama Baubau, 2024). Potensi ini sejalan dengan target pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kontribusi PDB maritim dari 7,6% pada tahun 2025 menjadi 15,0% pada tahun 2045, yang merupakan tugas kompleks dan menantang bagi Indonesia (Chairil Effendy et al., 2024).

Konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan atau *sustainable economic development* dalam konteks maritim mengacu pada pemanfaatan sumber daya kelautan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang untuk generasi saat ini dan mendatang. *Blue economy* atau ekonomi biru menjadi paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya maritim yang mencakup berbagai aktivitas seperti pengelolaan sampah, perikanan, pariwisata, transportasi maritim, energi terbarukan, dan mitigasi perubahan iklim (Rasyid et al., 2022). Setiap sektor tersebut berpotensi mendorong pembangunan Indonesia jika dikelola secara berkelanjutan, termasuk dalam konteks pengembangan wilayah seperti Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perkembangan konsep *maritime power* atau kekuatan maritim dalam literatur kontemporer tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga dimensi ekonomi, teknologi, diplomatik, dan tata kelola yang terintegrasi. Kekuatan maritim suatu wilayah tercermin dari kemampuannya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut secara optimal, membangun konektivitas maritim yang efisien, mengembangkan industri berbasis kelautan, serta menciptakan sistem tata kelola yang mendukung *sustainable ocean governance*. Indonesia telah meluncurkan *Blue Economy Roadmap* sebagai panduan komprehensif yang merupakan hasil kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, yang tidak hanya mendorong kemakmuran ekonomi tetapi juga memprioritaskan kesejahteraan ekosistem laut untuk memastikan generasi mendatang dapat merasakan manfaatnya (Phelan et al., 2020).

Fenomena global menunjukkan bahwa negara-negara dengan kekuatan maritim yang kuat cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh diversifikasi ekonomi yang lebih baik, ketahanan terhadap guncangan ekonomi eksternal, serta kemampuan adaptasi yang lebih tinggi terhadap perubahan iklim. Dalam konteks Indonesia, sejarah telah membuktikan bahwa kejayaan ekonomi kelautan Indonesia pernah diakui dunia pada era keemasan sebagai negara maritim yang sangat berpengaruh signifikan terhadap konstelasi perkembangan ekonomi dunia, seperti yang tercatat dalam Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan sejumlah Kesultanan Islam di berbagai belahan nusantara (Supriyadi et al., 2023).

Namun demikian, tantangan dalam mengimplementasikan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis kekuatan maritim di Sulawesi Tenggara masih cukup kompleks. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur maritim, rendahnya kualitas sumber

daya manusia di sektor kelautan, lemahnya koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan, serta minimnya investasi dalam riset dan pengembangan teknologi kelautan. Selain itu, isu-isu seperti *illegal fishing*, pencemaran laut, degradasi ekosistem pesisir, dan perubahan iklim juga menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam pengembangan ekonomi maritim berkelanjutan di kawasan ini.

Konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan di era modern juga tidak dapat dipisahkan dari pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya SDG 8 mengenai "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi" dan SDG 14 tentang "Kehidupan di Bawah Laut". Studi terkini menunjukkan bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan ganda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengatasi perubahan iklim, yang seringkali terhambat oleh keterbatasan finansial dalam memajukan transisi rendah karbon (*Sustainable Earth Reviews*, 2024). Oleh karena itu, pengembangan kekuatan maritim sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan di Sulawesi Tenggara perlu dirancang dengan pendekatan yang holistik dan adaptif terhadap dinamika global.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai potensi ekonomi maritim di Indonesia umumnya masih bersifat makro dan belum secara spesifik mengkaji potensi kekuatan maritim sebagai penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan di tingkat provinsi, khususnya Sulawesi Tenggara. Padahal, karakteristik geografis, sumber daya alam, dan kondisi sosial-ekonomi setiap provinsi memiliki keunikan tersendiri yang memerlukan pendekatan dan strategi pengembangan yang spesifik. Sulawesi Tenggara dengan keragaman potensi maritimnya, mulai dari perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, hingga posisi strategisnya dalam jalur perdagangan internasional, memerlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi model pengembangan kekuatan maritim yang paling sesuai dengan kondisi lokal dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian. Bagaimana potensi kekuatan maritim Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diidentifikasi dan dipetakan secara komprehensif untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan? Pertanyaan ini menjadi fundamental mengingat belum adanya pemetaan yang detail mengenai seluruh dimensi kekuatan maritim provinsi ini, yang mencakup aspek sumber daya alam kelautan, infrastruktur maritim, kapasitas sumber daya manusia, dan posisi strategis geografis.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji strategi dan model pengembangan seperti apa yang paling efektif untuk mengoptimalkan pemanfaatan kekuatan maritim dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sulawesi Tenggara? Pertanyaan ini penting untuk menjawab kebutuhan akan pendekatan yang tepat dalam mentransformasi potensi maritim menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan laut. Terakhir, faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dalam implementasi pengembangan kekuatan maritim sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan, serta bagaimana solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif potensi kekuatan maritim Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pendekatan multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan spesifik penelitian meliputi pemetaan dan identifikasi potensi kekuatan maritim yang dimiliki Sulawesi Tenggara, merumuskan strategi pengembangan ekonomi maritim berkelanjutan yang sesuai dengan karakteristik lokal, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusinya dalam implementasi pengembangan kekuatan maritim. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan kekuatan maritim untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan di provinsi tersebut.

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi maritim dan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai *maritime economy*, *blue economy*, dan *sustainable development* dengan fokus pada tingkat provinsi, yang selama ini masih terbatas dalam literatur akademik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan model teoritis pengembangan kekuatan maritim yang dapat diadaptasi untuk wilayah-wilayah lain dengan karakteristik serupa.

Dari segi manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis pada kekuatan maritim. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana strategis pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pariwisata bahari, serta sektor-sektor lain yang terkait dengan ekonomi maritim. Bagi dunia usaha dan investor, penelitian ini dapat memberikan informasi yang valuable mengenai peluang investasi di sektor maritim Sulawesi Tenggara, sementara bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di wilayah mereka dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi *library research* untuk menganalisis potensi kekuatan maritim sebagai penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam mengeksplorasi fenomena kompleks secara mendalam dan memberikan pemahaman holistik terhadap konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan yang melatarbelakangi permasalahan penelitian. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali nuansa-nuansa yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, serta memberikan fleksibilitas dalam menginterpretasi data yang bersifat deskriptif dan eksploratif (Nasir et al., 2023). Strategi *library research* atau penelitian pustaka merupakan metode yang tepat untuk membangun pemahaman komprehensif melalui analisis sistematis terhadap literatur yang relevan dan kredibel.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui *documentary analysis* terhadap berbagai sumber literatur sekunder yang meliputi jurnal ilmiah, laporan pemerintah, publikasi lembaga internasional, buku teks, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi maritim dan pembangunan berkelanjutan. Proses seleksi sumber data menggunakan kriteria relevansi topik, kredibilitas sumber, dan aktualitas publikasi dengan prioritas pada literatur yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Data dikumpulkan dari berbagai basis data akademik seperti Scopus, Web of Science, ScienceDirect, dan repositori institusional yang tersedia secara *open access*, serta publikasi resmi dari kementerian dan lembaga terkait di Indonesia. Pencarian literatur menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris seperti "kekuatan maritim", "*maritime power*", "ekonomi berkelanjutan", "*sustainable development*", "Sulawesi Tenggara", dan "*blue economy*".

Analisis data dilakukan menggunakan metode *thematic analysis* yang memungkinkan identifikasi, analisis, dan pelaporan pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Proses analisis dimulai dengan *coding* atau pengkodean data untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi dan sintesis temuan untuk mengembangkan tema-tema yang koheren dan bermakna. Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber data, yaitu dengan menggunakan berbagai jenis literatur dan perspektif yang berbeda untuk memverifikasi temuan penelitian. Penelitian yang menggunakan penelitian pustaka memerlukan kehati-hatian dalam mengevaluasi kualitas sumber dan memastikan representatifitas data yang dianalisis.

Kerangka analisis penelitian ini mengadopsi pendekatan *interpretive framework* yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna dan konteks dari fenomena yang diteliti. Proses interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks historis, geografis, dan sosial-ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai wilayah kepulauan dengan karakteristik unik. Analisis juga mempertimbangkan perspektif *multi-stakeholder* dengan mengintegrasikan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat yang terlibat dalam pengembangan ekonomi maritim. Keluaran penelitian berupa deskripsi analitis yang komprehensif mengenai potensi, strategi, dan tantangan pengembangan kekuatan maritim di wilayah studi, serta rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis maritim.

## HASIL DAN DISKUSI

### 4.1 Profil dan Potensi Kekuatan Maritim Sulawesi Tenggara



**Gambar 1.** Peta Demografis Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berlokasi di bagian tenggara Pulau Sulawesi dengan Kendari sebagai ibu kotanya. Sebelumnya, wilayah ini merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk kabupaten yang berpusat di Kecamatan Baubau, hingga kemudian ditetapkan menjadi daerah otonom melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 yang diperkuat dengan UU Nomor 13 Tahun 1964. Secara geografis, provinsi ini berada di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi pada koordinat  $02^{\circ}45'$  -  $06^{\circ}15'$  Lintang Selatan dan  $120^{\circ}45'$  -  $124^{\circ}30'$  Bujur Timur, memiliki luas daratan mencapai  $38.140 \text{ km}^2$  dan wilayah perairan seluas  $110.000 \text{ km}^2$ , serta dihuni oleh sekitar 2,8 juta penduduk pada akhir tahun 2024.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki karakteristik geografis yang sangat strategis sebagai wilayah kepulauan dengan potensi maritim yang beragam. Analisis terhadap kondisi serupa di wilayah Indonesia Timur menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan karakteristik kepulauan memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar, sebagaimana terjadi di Kabupaten Tolitoli yang mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan (Laheng et al., 2022). Potensi investasi perikanan di wilayah kepulauan seperti Sulawesi Tenggara tidak hanya terbatas pada aspek produksi, tetapi juga mencakup seluruh rantai nilai mulai dari hulu hingga hilir.

Kekuatan maritim Sulawesi Tenggara juga tercermin dari posisinya yang strategis dalam konteks geopolitik maritim Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim (Asmar et al., 2023). Dalam konteks ini, Sulawesi Tenggara berperan penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi yang terintegrasi.

Potensi sumber daya maritim Sulawesi Tenggara mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan. Penguatan sektor maritim memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan ekonomi, mengingat potensi sumber daya alam yang melimpah pada sektor ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi pelabuhan, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan pemanfaatan potensi laut lainnya (Ilham et al., 2024). Integrasi sektor maritim dengan sektor-sektor lain yang didukung oleh investasi infrastruktur, riset, dan kebijakan berkelanjutan mampu meningkatkan daya saing produk di pasar global.

## 4.2 Kondisi Eksisting Ekonomi Maritim Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi maritim besar sebagai gerbang Indonesia Timur, dengan pelabuhan Kendari New Port dan Pelabuhan Murhum Baubau yang strategis menghubungkan Makassar, Maluku, dan Papua. Pemerintah daerah sedang mendorong pengembangan pelabuhan ini melalui skema KPBU dan dukungan Kemenhub agar menjadi terminal kontainer, curah dan moda ganda. Rencana juga mencakup pembangunan pelabuhan dan bandara bertaraf internasional untuk memperkuat konektivitas global dan mendukung pertumbuhan ekspor dan investasi. Sektor perikanan—baik tangkap maupun budidaya—menjadi pilar utama ekonomi maritim, didukung oleh armada kapal perintis Tol Laut dan layanan ferry ASDP yang memperlancar distribusi hingga Wakatobi dan pulau-pulau sekitarnya, mengangkut ratusan ribu orang dan kendaraan per tahun. Namun, masih ada tantangan seperti infrastruktur pelabuhan yang belum maksimal—misalnya proses KPBU Pelabuhan Murhum yang tertunda—serta akses darat, gudang pendingin, dan sistem digitalisasi kelautan yang perlu ditingkatkan.

Aspek	Kondisi Eksisting
Pelabuhan utama	Kendari New Port & Murhum Baubau sebagai hub kontainer, curah & multimoda
Skema pembangunan	KPBU di Pelabuhan Murhum masih dalam tahap studi/lelang sejak 2019
Infrastruktur pendukung	Ferry ASDP dengan ~347.619 penumpang & 102.095 kendaraan tahun 2024; Tol Laut aktif
Proyek strategis	Rencana pelabuhan dan bandara internasional, modernisasi bandara Haluoleo & runway Baubau
Tantangan utama	Akses jalan, fasilitas logistik laut, digitalisasi, dan kelembagaan pengelolaan laut yang perlu ditingkatkan

Kondisi eksisting ekonomi maritim di Indonesia menunjukkan bahwa sektor-sektor *Blue Economy* seperti perikanan, akuakultur, transportasi maritim, dan pariwisata mengalami perkembangan yang notable dari tahun 2000 hingga 2020 (Phelan et al., 2020). Dalam konteks regional Indo-Pasifik, perkembangan ini didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap produk dan layanan berkelanjutan, kemajuan teknologi, serta kolaborasi regional yang semakin intensif. Namun demikian, tantangan dalam pengelolaan ekonomi maritim masih signifikan, terutama terkait dengan sistem pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan dengan tetap mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial bagi nelayan menunjukkan kompleksitas dalam mengelola sektor perikanan (Trenggono, 2023).

Model pengelolaan berbasis kuota ini menjadi alternatif bagi kebijakan pembatasan izin kapal yang selama ini dinilai kurang implementatif dan menciptakan mental 'race to fish'. Kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap pendapatan negara saat ini masih didominasi oleh sistem Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Praproduksi yang dinilai kurang berkeadilan karena tidak memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha perikanan. Sistem ini berpotensi memperburuk status stok sumber daya ikan karena pelaku usaha cenderung memaksimalkan hasil tangkapan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Kondisi ini mencerminkan perlunya

reformasi dalam sistem pengelolaan ekonomi maritim yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

#### 4.3 Konsep dan Model Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maritim

Konsep *Blue Economy* dalam kawasan Indo-Pasifik telah menunjukkan potensi signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mempromosikan kemajuan sosial, dan memastikan keberlanjutan lingkungan (Akapip, 2023). Kerangka kebijakan yang memfasilitasi pengembangan *Blue Economy* mencakup pengelolaan laut terpadu, inisiatif pertumbuhan biru, keamanan dan tata kelola maritim, serta resiliensi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Model pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis maritim juga dapat mengadopsi pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, sebagaimana yang berhasil diterapkan dalam membangun ekosistem kewirausahaan pariwisata laut berkelanjutan di Negeri Hukurila, Kota Ambon (Akapip, 2023). Dalam model ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui implementasi kebijakan yang mendukung, penyediaan pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan infrastruktur, sementara masyarakat berpartisipasi aktif sebagai pelaku utama usaha yang memanfaatkan potensi lokal.

Integrasi kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan juga menjadi aspek penting, sebagaimana ditunjukkan oleh peran perempuan adat Suku Asli Karimun dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir melalui penerapan praktik ekoteologi Kepala Jambu (Risamasu, 2023). Model ini mengungkapkan hubungan kompleks antara kearifan lokal dan praktik berkelanjutan yang dapat menjadi basis dalam merekonstruksi pendekatan pembangunan yang melibatkan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan kesetaraan gender.

#### 4.4 Strategi Optimalisasi Kekuatan Maritim untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Strategi optimalisasi kekuatan maritim memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci utama, sebagaimana ditunjukkan melalui upaya mendorong generasi muda untuk melakukan kegiatan wirausaha dalam lingkup perikanan dan kelautan (Laheng et al., 2022). Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan dapat menumbuhkan minat berwirausaha sehingga potensi perikanan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Inovasi dan ekspansi dalam sektor *Blue Economy* telah didorong oleh terobosan teknologi seperti *autonomous underwater vehicles*, proyek energi terbarukan, teknologi penginderaan jauh, dan bioteknologi kelautan (Herbanu & Soediantono, 2018). Penerapan teknologi-teknologi ini dalam konteks Sulawesi Tenggara dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor maritim sekaligus mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan. Kolaborasi yang intensif dan berbasis kepercayaan antara berbagai pemangku kepentingan telah terbukti dapat meningkatkan daya saing ekosistem pariwisata di suatu wilayah (Rasyid et al., 2022). Model kolaborasi yang adaptif dan partisipatif dapat menjadi referensi untuk mengembangkan ekosistem kewirausahaan maritim di daerah pesisir lainnya, dengan penekanan pada penguatan kapasitas masyarakat, diversifikasi usaha berbasis potensi lokal, dan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan.

#### 4.5 Tantangan dan Hambatan Pengembangan Kekuatan Maritim

Pengembangan kekuatan maritim menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan penanganan sistematis. Tantangan utama mencakup kompleksitas regulasi, akses terhadap pembiayaan, infrastruktur yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan yang perlu ditangani untuk merealisasikan potensi penuh *Blue Economy* (Risamasu, 2023). Tantangan-tantangan ini memerlukan upaya terkoordinasi dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pembangunan internasional. Dalam konteks pariwisata

maritim berkelanjutan, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, kendala kapasitas masyarakat, dan ancaman degradasi lingkungan. Keterbatasan ini menghambat optimalisasi potensi maritim dan memerlukan pendekatan yang holistik dalam penanganannya.

Tantangan lain yang signifikan adalah terkait dengan kedaulatan maritim Indonesia. Saat ini Indonesia menghadapi periode keterbatasan strategis dimana kedaulatan terganggu karena keunggulan kompetitif industri pertahanan belum menjadi prioritas (Herbanu & Soediantono, 2018). Ancaman global yang meningkat, ditandai dengan tatanan internasional berbasis aturan yang didominasi oleh kepentingan negara-negara tertentu, menciptakan lingkungan keamanan yang lebih kompleks dan tidak stabil.

#### 4.6 Solusi dan Rekomendasi Kebijakan

Penyelesaian tantangan pengembangan kekuatan maritim memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota dapat meminimalkan manipulasi ukuran kapal, memaksimalkan pendapatan negara, memenuhi prinsip keadilan berusaha, serta menjaga partisipasi aktif nelayan kecil (Trenggono, 2023). Melalui penerapan kebijakan ini, peningkatan kesejahteraan nelayan, keseimbangan kegiatan ekonomi lintas wilayah, keberlanjutan sumber daya perikanan, dan kesehatan laut dapat tercapai.

Rekomendasi untuk pengembangan ekosistem kewirausahaan maritim mencakup penguatan kapasitas masyarakat, diversifikasi usaha berbasis potensi lokal, dan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Supriyadi et al., 2023). Model kolaborasi adaptif dan partisipatif dapat menjadi referensi untuk pengembangan di daerah pesisir lainnya.

Untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia, diperlukan sinergi antara Pemerintah, TNI (TNI AL), dan Pemerintah daerah yang memiliki garis pantai dalam penyusunan payung hukum terkait kebijakan maritim (Asmar et al., 2023). Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan implementasi yang efektif. Pembangunan pertahanan maritim Indonesia dapat dilakukan melalui intensifikasi berbagai hal yang berkaitan dengan pemenuhan elemen-elemen kekuatan maritim, yang perlu dipertimbangkan segera oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait (Herbanu & Soediantono, 2018).

#### KESIMPULAN

Penelitian mengenai potensi kekuatan maritim sebagai penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara menghasilkan temuan signifikan yang berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi dan bisnis maritim Indonesia. Sulawesi Tenggara memiliki posisi geografis strategis sebagai bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dengan potensi maritim yang beragam mencakup perikanan, pariwisata bahari, dan transportasi laut yang belum dioptimalkan secara maksimal.

Analisis komprehensif menunjukkan bahwa transformasi potensi maritim menjadi kekuatan ekonomi riil memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Model pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis blue economy dapat diterapkan melalui kolaborasi adaptif antara pemerintah dan masyarakat, dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai kunci utama keberhasilan. Implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota terbukti dapat menjadi solusi efektif untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan sambil meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kompleksitas regulasi, keterbatasan infrastruktur maritim, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan degradasi lingkungan laut. Solusi strategis yang direkomendasikan mencakup sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, diversifikasi usaha berbasis potensi lokal, dan penerapan teknologi maritim modern. Kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan ekonomi dan bisnis terletak pada

penyediaan kerangka teoritis dan praktis untuk mengoptimalkan kekuatan maritim daerah kepulauan, yang dapat diadaptasi untuk wilayah lain dengan karakteristik serupa guna mendukung pencapaian Sustainable Development Goals dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akapi, N. (2023). *Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Membangun Ekosistem Kewirausahaan Pariwisata Bahari Berkelanjutan di Negeri Hukurila, Kota Ambon*. 18(1), 50-64.
- Asmar, Y., Apriyanto, I. N. P., Prakoso, L. Y., Taufik, R. M., Ansori, Parwata, I. N., Suseto, B., Priyanto, & Purwatoro, S. A. (2023). Kebijakan Poros Maritim Dunia Dihadapkan Dengan UU No.32 Tahun 2014 Dalam Rangka Mewujudkan ketahanan Nasional. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(8), 3305-3318.
- Chairil Effendy, Muhammad Rafi Darajati, & Annisa Dina Amalia. (2024). Development Of Maritime Culture In Supporting Optimization Of Blue Economy Potentia In West Kalimantan. *Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science*, 04(01), 292-321.
- Herbanu, R. P., & Soediantono, D. (2018). Industri Pertahanan Indonesia Dalam Membangun Kekuatan Maritim Nasional. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(4), 26-31. <https://jiemar.org/index.php/jiemar/article/download/304/224>
- Ilham, D., Anjelli, S., & Ratnawati, E. (2024). *Implementasi Metode WordWall dalam Kajian Sosial Ekonomi Maritim dan Agrikultur di Indonesia*. 1, 1-7.
- Laheng, S., Putri, D. U., Darmawati, D., Putri, I. W., Adli, A., & Aliyas, A. (2022). Penyuluhan Potensi Komoditas Perikanan Kabupaten Tolitoli Dalam Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Siswa SMA Negeri 2 Tolitoli. *Jurnal Cendekia Mengabdikan Berinovasi Dan Berkarya*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.56630/jenaka.v1i1.223>
- Nasir, A., Nurjana, Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif 1. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4445-4451. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APendekatan>
- Phelan, A., Ruhanen, L., & Mair, J. (2020). Ecosystem services approach for community-based ecotourism: towards an equitable and sustainable blue economy. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(10), 1665-1685. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1747475>
- Rasyid, S. B. A. B. D., Purnomo, E. P., Salsabila, L., & Fathani, A. T. (2022). Discourse Analysis of Online News on Green Economy an Blue Economy for Sustainable Development: The Case in Indonesia. *Fronteiras*, 11(1), 165-180. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2022v11i1.p165-180>
- Rhodora V. Azanza, Sanchez-Escalona, K., & Largo, D. B. (2022). A Sustainable and Inclusive Blue Economy for the Philippine Archipelago. *Transactions of the National Academy of Science and Technology*, 44(2022), 1-11. <https://doi.org/10.57043/transnastphl.2022.2564>
- Risamasu, M. (2023). *Interkoneksitas Ekoteologi Kepala Jambu Dan Peran Perempuan Adat Suku Asli Karimun Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Wilayah Pesisir*. 2227-2256.
- Supriyadi, S., Afrisal, M., Situmorang, R. P., Mau, K. T. B., Widodo, A., Isdianto, A., & Puspitasari, I. D. (2023). Local and Migrant Fishermen Marine Cultures in the Atapupu Coastal Area in Supporting the Blue Economy in Maritime Security. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 9(1), 131. <https://doi.org/10.33172/jp.v9i1.1864>
- Trenggono, S. W. (2023). Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1, 1. <https://doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12057>